



## PERMASALAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI DALAM SEKTOR PENDIDIKAN

**Muhidin Arifin**  
**Fahrizal Akhiruddin**  
[muhidin@gmail.com](mailto:muhidin@gmail.com)  
**Universitas Islam Nusantara Bandung**

### Abstrak

Berdasarkan data dalam *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* yang dikeluarkan UNESCO menunjukkan bahwa indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei atau turun empat tingkatan jika dibandingkan hasil survei sebelumnya yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 65. Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Sedangkan kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kejelasan tujuan dan arah kebijakan yang hendak dicapai. Standar kualitas merupakan perwujudan dari komitmen kolektif untuk menjadi bangsa yang unggul, maju, dan berperadaban. Oleh karena itu, keunggulan pendidikan menjadi indikator majunya suatu bangsa, sebaliknya rendahnya daya saing bangsa merupakan pencerminan dari rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan. Reformasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Sebab, cara-cara yang selama ini dilaksanakan dalam pengelolaan pendidikan tidak akan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang muncul saat ini. Krisis moneter dan ekonomi yang diikuti oleh krisis politik, kepercayaan dan keamanan, mempercepat realisasi reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan yang diperlukan bersifat menyeluruh dan mendasar, menyangkut dimensi kultural-fondasional, politik-kebijakan, teknis-operasional, dan, dimensi kontekstual. Tambal sulam dalam dunia pendidikan saat ini harus dihindarkan, sebab hanya akan berakibat menunda datangnya bencana yang lebih parah lagi. Betapapun Reformasi merupakan suatu keharusan, tetap saja akan muncul resistensi yang menghambat jalannya reformasi.

Kata kunci: Reformasi birokrasi, sektor pendidikan

### Abstract

Based on data in the *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* issued by UNESCO, it shows that Indonesia's education development index is at 69th out of 127 countries surveyed or down four levels when compared to the results of the previous survey which placed Indonesia at 65th place. country has a significant relevance to the quality of education provided. While the quality of education is directly proportional to the clarity of goals and policy directions to be achieved. Quality standards are a manifestation of a collective commitment to become a superior, advanced, and civilized nation. Therefore, the excellence of education is an indicator of the progress of a nation, on the contrary, the low competitiveness of the nation is a reflection of the low quality of the education produced. Education reform is a must. This is because the methods that have been implemented so far in the management of education will not be able to solve the problems that arise today. The monetary and economic crisis, which was followed by a political, trust and security crisis, accelerated the realization of education reform. The educational reforms required are comprehensive and fundamental, involving the cultural-foundational, political-policy, technical-operational dimensions, and contextual dimensions. Patchwork in the world of education today must be avoided, because it will only result in delaying the arrival of a more severe disaster. However reform is a necessity, there will still be resistance that will hinder the progress of reform.

Key words: bureaucratic reform, education sector

## **PENDAHULUAN**

Tujuan utama yang ingin dicapai dari reformasi pendidikan adalah pendidikan yang berkualitas yang dapat menjadi modal pembangunan manusia di suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas bukanlah variabel mandiri yang dapat dicapai hanya dengan memperbaiki infrastruktur sekolah maupun kurikulum dan anggaran pendidikan. Dalam RPJMN 2010-2014 disebutkan bahwa sektor pendidikan merupakan bahwa pendidikan merupakan Prioritas Nasional ke-2, yaitu Pendidikan yang ditujukan terutama untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien.

Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Sedangkan kualitas pendidikan berbanding lurus dengan kejelasan tujuan dan arah kebijakan yang hendak dicapai. Standar kualitas merupakan perwujudan dari komitmen kolektif untuk menjadi bangsa yang unggul, maju, dan berperadaban. Oleh karena itu, keunggulan pendidikan menjadi indikator majunya suatu bangsa, sebaliknya rendahnya daya saing bangsa merupakan pencerminan dari rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan.

Berdasarkan data dalam Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan UNESCO menunjukkan bahwa indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei atau turun empat tingkatan jika dibandingkan hasil survei sebelumnya yang menempatkan Indonesia pada urutan ke 65. Survei itu menggunakan empat tolok ukur, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada anak usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan peserta didik hingga kelas V sekolah dasar. Prestasi tersebut akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang jika tidak sesegera mungkin dilakukan perbaikan di sektor pendidikan.

Secara normatif, kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan tercermin dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang tinggi diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang baik sehingga mampu berkompetisi secara global dengan negara-negara di dunia. Namun, kenyataan menunjukkan realitas yang sebaliknya. Berbagai permasalahan internal seperti layanan pendidikan tanpa diskriminasi, ketersediaan dana untuk program wajib belajar, ketersediaan tenaga pendidik yang bermutu, pembinaan tenaga pendidik untuk sekolah dan di luar sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi hambatan utama dalam menciptakan pendidikan yang

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan bermutu.<sup>1</sup>

Nampaknya, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain untuk merumuskan langkah strategis dalam membangun sektor pendidikan. Langkah yang dimaksud seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Pendidikan dalam membentuk National Commission on Excellence in Education pada bulan Agustus 1981. Tujuan komisi tersebut dibentuk tercermin dalam laporan ketua komisi nasional untuk Keunggulan Pendidikan di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa:

*Our purpose has been to help define the problems afflicting American education and to provide solutions, not search for scapegoats. We addressed the main issues as we saw them, but have not attempted to treat the subordinate matters in any detail. We were forthright in our discussions and have been candid in our report regarding both the strengths and weaknesses of American education.*<sup>2</sup>

Resiko yang dimaksud ketika mereka menganalisis berbagai kelemahan, pencapaian, dan berbagai prestasi yang diraih kemudian membandingkan dengan negara-negara lain. Mereka (komisi nasional) menemukan beberapa keunggulan negara-negara lain seperti Jepang yang telah berhasil memproduksi berbagai jenis mobil yang jauh lebih efisien dari hasil produksi Amerika Serikat, Korea Selatan berhasil membangun industri baja paling efisien, peralatan mesin yang menjadi kebanggaan Amerika Serikat di dunia internasional telah diambilalih oleh produk-produk Jerman. Mereka betul-betul menyadari bahwa hanya dengan mereformasi pendidikan, Amerika Serikat mampu menjadi negara besar yang unggul.

Oleh karena itu reformasi pendidikan harus difokuskan pada tujuan untuk menciptakan masyarakat belajar. Dengan begitu, pendidikan yang dibangun bukan hanya untuk mengembangkan karir-karir tertentu dalam dunia kerja melainkan juga untuk mengembangkan kualitas secara menyeluruh termasuk nilai-nilai moral dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Reformasi pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk itu dua hal yang perlu dilakukan dalam reformasi: a) mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat teraksananya pendidikan, dan, b) merumuskan reformasi yang bersifat strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, kondisi yang diperlukan dan program aksi yang harus diciptakan merupakan titik sentral yang perlu diperhatikan dalam setiap reformasi

---

<sup>1</sup> Didit Putra Erlangga Rahardjo, "Rapor Merah untuk Pendidikan di Kota Bandung," *KOMPAS.com* (blog), 2012, <https://edukasi.kompas.com/read/2011/12/27/16432084/Rapor.Merah.untuk.Pe%20ndidikan.di.Kota.Bandung>.

<sup>2</sup> Muhammad Yaumi (2017) Reformasi Sistem Pendidikan di Indonesia: Suatu Refleksi Kritis Menuju Perbaikan Kualitas. Discussion Paper. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan pendidikan. Dengankata iain, reformasi pendidikan harus mendasarkan pada realitas sekolah yang ada, bukan mendasarkan pada etalase atau jargon-jargon pendidikan semata.Reformasi hendaknya didasarkan pada fakta dan hasii peneitian yang memadai dan vaild, sehingga dapat dikembang kan program reformasi yang utuh, jeias dan reaiistis.

Dari uraian latar belakang maka makalah ini mengemukakan pembahasan dengan judul: **“Permasalahan dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan”**.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Moleong setelah melakukan analisis terhadap beberapa definisi penelitian kualitatif kemudian membuat definisi sendiri sebagai sintesis dari pokok-pokok pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>3</sup>

Jadi penelitian ini merupakan jenis penelian fenemonologi tentang Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, Apakah sistem pendidikan saat ini memerlukan reformasi/inovasi, Adakah rekomendasi yang perlu diberikan sehubungan dengan perlunya reformasi sistem pendidikan sehingga membawa dampak pada kemajuan bangsa Indonesia.

### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2017), h. 6.

<sup>4</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.
- 2) Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan ‘perburuan’ yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
- 3) Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan.
- 4) Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Konten Analisis konten (content analysis) atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Analisis konten (content analysis) juga merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.
2. Analisis Induktif Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga hipotesis diterima dan hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>5</sup>

3. Deskriptif Analitik Metode deskriptif analitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal. Teknik deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk mengungkapkan relevansi konsep pendidikan berbasis pengalaman dalam buku *Experience and Education* karya John Dewey yang telah didapat sebelumnya dalam pendidikan Islam.<sup>6</sup>

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Reformasi Birokrasi

Birokrasi diyakini dicetuskan oleh seorang fisiokrat dan pemikir ekonomi politik *Vincent de Gournay* pada tahun 1745. Pada awalnya, istilah ini digunakan dalam artian peyoratif (dengan nada negatif atau mengecam), yaitu untuk menyebut bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh para pejabat dan kekuasaannya yang terlalu besar yang berada di tangan pejabat. Pada awal abad 19 di Eropa, birokrasi sering menjadi sasaran dari cemooh dan kritikan karena dianggap malas dan tidak efisien, karena para pejabatnya dianggap sewenang-wenang dan dianggap terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan sosial dan menyalahgunakan kekuasaannya.<sup>7</sup>

Tokoh literature birokrasi Victor Thomson, berucap “birokrasi tidak mengenal belas kasihan. Tidak pula mengenal cinta kasih. Dikatakan selanjutnya bahwa birokrasi itu bersifat “impersonal”. Semua hal yang bertalian dengan urusan pribadi tidak berlaku dalam birokrasi. Penyakit Birokrasi adanya keinginan birokrasi untuk selalu menambah jumlah organisasinya, tanpa melakukan evaluasi terhadap lembaga organisasi yang ada (*the existing units*), apakah masih efektif atau justru tidak efektif kerjanya. Jika tidak efektif bisa saja dibubarkan atau digabung pada yang baru atau kalau masih efektif jangan dibentuk organisasi baru yang tugas pokoknya mirip atau sama. Penyakit yang suka menambah-nambah atau membentuk organisasi baru.

Teori organisasi menyebutkan *Proliferation*. Proliferasi tergolong penyakit birokrasi. Menurut konsepnya, penyakit ini tumbuh karena pimpinan lembaga birokrasi kejangkitan penyakit Parkinson yakni suatu penyakit bahwa para pimpinan birokrasi merasa akan tambah wibawa, berkuasa bergengsi jika dia mempunyai jumlah staf yang banyak tanpa dianalisis apakah

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 335.

<sup>6</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosoal Humaniora Pad Umumnya* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336.

<sup>7</sup> Eva Etzioni Halevy, *Demokrasi & Birokrasi: Sebuah Dilema Politik* (Yogyakarta: Metapena Institute, 2011), h. 13.

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan jumlah stafnya bisa bekerja atau tidak.<sup>8</sup>

## 2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota. Kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi.<sup>9</sup> Lebih lanjut kebijakan merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga (pemerintah) dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum.

Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>10</sup> Pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan diantaranya yaitu faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan pendidikan, faktor alat pendidikan dan faktor lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem yang sistematis yang saling berkaitan antar sub sistem.

## 3. Komponen Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu.

Ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu; 1) *Goal* (Tujuan). Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak; 2) *Plans* (Rencana). Setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas; 3) *Programme* (Program). Setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program

---

<sup>8</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 91.

<sup>9</sup> Amir Syarifudin Kiwang, David B. W. Pandie, dan Frans Gana, "Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi," *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 3 (4 September 2014).

<sup>10</sup> Hamzah Junaid, "Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional)," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 7, no. 2 (2012).

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan; 4) *Decision* (Keputusan). Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak; 5) *Efects* (Dampak). Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupa dampak priimer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.<sup>11</sup>

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Problematika Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Dalam hubungannya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan nasional saat ini dipandang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan bangsa. Padahal, hal ini akan membawa implikasi terhadap kemakmuran dan martabat mulia bangsa. Di samping itu, rancangan pendidikan nasional belum berhasil keluar dari kerangka politik etis sebagaimana pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda. Hal itu dapat dicermati dari berbagai kebijakan yang cenderung diskriminatif, pendidikan yang berorientasi menghasilkan tenaga kerja murah, dan menciptakan lulusan yang mampu menjadi pegawai negara.

Pertama, kebijakan pendidikan yang cenderung diskriminatif dapat dicermati dari adanya kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menjadikan sekolah menengah kejuruan (SMK) berbanding 70:30 dengan sekolah menengah umum (SMU) lainnya. Rasio perbandingan jenis sekolah seperti ini dapat melahirkan perbedaan prioritas yang berimbas pada tingginya perhatian

---

<sup>11</sup> C. O. Jones, "American Politics And The Organization Of Energy Decision Making," *Annual Review of Energy* 4, no. 1 (1979).

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3.

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan pemerintah pada jenis sekolah kejuruan di satu sisi dan “seolah” mengabaikan pengembangan keseluruhan jenis sekolah umum yang ada di sisi lain. Begitu pula dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan berstandar internasional (RSBI) juga telah membawa dampak disparitas baru khususnya dalam hubungannya dengan pemberian sarana dan prasarana pendidikan, walaupun juga telah diakui dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas bagi sekolah-sekolah tertentu. Secara konseptual, memang siswa Sekolah International dirintis untuk menyamai kurikulum internasional seperti pada Cambridge atau International Baccalaureate (IB). Dari segi tujuan dan visi memang sangat bagus, di mana siswa sudah dilatih untuk berkomunikasi secara global dengan bahasa Inggris. Siswa SBI juga memiliki pengalaman belajar yang sama dengan IB atau Cambridge. Namun, dilihat dari berbagai aspek, perhatian pemerintah terhadap sekolah yang berstandar internasional telah menimbulkan gap yang begitu besar dengan sekolah-sekolah yang berstandar lokal, regional, dan bahkan yang berstandar nasional.

Kedua, pendidikan berorientasi menciptakan tenaga kerja murah, yang oleh sebagian pandangan menganggap sebagai kebijakan yang salah arah, karena hanya sebagai penyedia supply tenaga kerja (pekerja) murah, bukan menjadi lokomotif lokomotif penggerak ekonomi melalui wirausaha (entrepreneurship) yang mandiri. Berdasarkan laporan Global Entrepreneurship Monitor menunjukkan bahwa Singapura telah menciptakan tenaga handal interpreneur sebesar 2,1 persen pada tahun 2001 dan menjadi 7,2 persen tahun 2005. Sedangkan Indonesia hanya mampu menghasilkan 0.18 persen pada tahun 2006 atau hanya memiliki 400.000 dari jumlah penduduk sebesar 230 juta. Selama ini, Indonesia hanya mampu mengeksport TKI yang identik dengan pekerja pembantu rumah tangga atau buruh kasar yang nota bene memiliki kualifikasi pendidikan rendah sehingga cenderung diperlakukan tidak manusiawi.

Ketiga, pendidikan hanya mampu menciptakan lulusan yang cenderung menjadi pegawai negara saja. Lulusan masih banyak yang tidak memiliki keterampilan yang memadai yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bayangkan, setiap tahun Indonesia memproduksi sekitar 300.000 sarjana dari 2.900 perguruan tinggi. Dari sekian banyak sarjana terungkap bahwa jumlah pengangguran terdidik (lulusan perguruan tinggi) melonjak tajam hampir dua kali lipat dalam empat tahun terakhir. Pada Februari 2005, jumlah penganggur dengan pendidikan universitas masih 385.400 orang. Empat tahun kemudian, yakni pada Februari 2009, jumlahnya sudah mencapai 626.600 orang. Angka ini bertambah besar jika digabung lagi dengan pengangguran lulusan diploma yang mencapai 486.400 orang. Meningkatnya jumlah pengangguran intelektual di Indonesia diakibatkan para sarjana yang orientasinya mencari kerja, tapi bukan menciptakan pekerjaan karena melibatkan penguasaan keterampilan yang memadai yang harus dimiliki para sarjana tersebut.

Permasalahan lain yang hingga kini belum dapat diatasi secara serius adalah ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan, di satu sisi menganut sistem desentralisasi dalam pengertian menyerahkan sebagian kekuasaan dari pusat kepada daerah, tetapi di sisi lain pengendalian kebijakan masih tetap dilakukan secara sentralistik dari pusat pemerintahan. Kakaburan sistem pengelolaan pendidikan tidak saja membawa konsekuensi logis pada ketidakjelasan visi bersama dan program pendidikan yang tidak diagendakan dalam strategi pembangunan ekonomi dan kebudayaan bangsa, melainkan juga ketidakjelasan kebijakan antara pendidikan berorientasi pada pembangunan daerah atau pendidikan nasional. Nampaknya, hal inilah yang mendorong pelaksanaan pendidikan sepertinya berjalan tanpa arah yang jelas.

Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah desakan perubahan dewasa ini persoalan pendidikan tidak pernah akan selesai, seperti dijelaskan oleh Muhammad Nuh bahwa jangan pernah berharap persoalan pendidikan akan selesai. Maka, menapaki tahun depan, persoalan masih akan terus mengiringi perjalanan pendidikan di Tanah Air.

Ketiga, masalah sarana dan prasarana sekolah yang diakibatkan oleh kesulitan pemerintah menentukan jumlah riil dana pendidikan yang dibutuhkan setiap tahun. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mengakui bahwa pendidikan yang ada di wilayah timur Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur tertinggal 17 tahun ke belakang jika ditilik dari sisi angka partisipasi khusus (APK). Kenyataan ini memberi isyarat adanya disparitas mutu yang terjadi begitu besar antara propinsi-propinsi di Indonesia. Menyadari berbagai permasalahan seperti dikemukakan di atas, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kebijakan pendidikan dilaksanakan berdasarkan pengamatan dangkal melalui trial dan error sistem mencoba-coba dan salah. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Sulistyono dengan kebijakan pendidikan dijalankan tanpa didahului kajian teori yang mendalam dan tidak didukung oleh studi empiris tentang kelayakan dan tingkat akseptabilitasnya.<sup>13</sup>

## **2. Dimensi Kultural-Fondasional, dimensi Politik-Kebijakan, dimensi Teknis-Operasional, dan Dimensi Kontekstual Dalam Reoformasi Pendidikan**

### **a. Dimensi Fondasional Kultural**

Dimensi kultural berkaitan dengan nilai, keyakinan dan norma-norma berkaitan dengan pendidikan, seperti apa sekolah itu? siapa guru itu? Seberapa jauh materi yang harus dipelajari oleh siswa? dan, siapa Siswa itu? Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol sekolah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan gambaran fungsi dan tanggung

---

<sup>13</sup> Zamroni, "Reformasi Pendidikan Dari Pondasi ke Aksi," *EL TARBAWI*, 2016.

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan  
jawabserta peranan komponen sekolah: Kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, siswa, bahkan orang tua siswa. Secara khusus, reformasi pendidikan ditunjukkan oleh perilaku dan peran baru siswa khususnya dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Perubahan pada diri siswa tersebut sebagai hasil adanya perubahan perilaku pada diri guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar khususnya, dan perubahan iklim sekolah pada umumnya.

Perubahan perilaku guru merupakan perubahan pada aspek teknis yang dapat disebabkan oleh aspek politik. Namun, reformasi pendidikan tidak lebih dari sekadar dimensi teknis dan politik, melainkan harus memasukkan dimensi kultural dalam proses reformasi. Sementara aspek kultural merupakan sesuatu yang bersifat relatif abstrak dan sulit dikendalikan. Aspek kultural dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam dunia pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai dan keyakinan ini merupakan inti dari reformasi pendidikan.

Berkaitan dengan dimensi kultural ini, sekolah harus diperlakukan sebagai suatu institusi yang memiliki otonomi dan kehidupan (organik), bukan sekadar institusi yang merupakan bagian dari suatu sistem yang besar (mekanik). Sebagai suatu sistem organik, sekolah dilihat sebagai suatu tubuh manusia yang memiliki sifat kompleks dan terbuka yang harus didekati dengan sistem thinking. Artinya, dalam mengelola sekolah harus melihat sekolah sebagai suatu kesatuan yang utuh, dan harus memperhatikan aspek yang lain, sehingga dengan pendekatan sistem thinking tersebut dapat diidentifikasi struktur, umpan balik, seperti: a) keterbatasan perubahan pendidikan, b) persebaran sasaran reformasi pendidikan, c) perkembangan pendidikan, dan d) sektor pendidikan yang kurang dijamah.<sup>14</sup>

#### b. Dimensi Politik Kebijakan

Dimensi politik berkaitan dengan otoritas, kekuasaan dan pengaruh, termasuk di dalamnya negosiasi untuk memecahkan konflik-konflik dan issue-issue pendidikan. Aspek politik dari reformasi pendidikan amat kompleks, karena reformasi memiliki wajah plural yang satu sama lain saling berinteraksi. Keberhasilan dalam mengendalikan aspek politik ini ditunjukkan dengan adanya berbagai kebijakan tetapi satu kebijakan dengan yang lain saling melengkapi, yaitu meningkatkan kemajuan pendidikan. Di samping itu juga, ditunjukkan oleh adanya serangkaian kebijakan di mana kebijakan yang kemudian melengkapi kebijakan sebelumnya. Dimensi politik ini tidak sekadar adanya hak-hak politik warga sekolah, khususnya guru dan kepala sekolah, tetapi memiliki pengertian yang lebih luas. Yakni, penekanan pada adanya kebebasan atau otonomi sekolah, khususnya dalam kaitan dengan masyarakat sekitarnya. Dengan otonomi yang dimiliki sekolah, keberadaan sekolah akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat

---

<sup>14</sup> Zamroni.

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan  
sekitar nya. Sekolah tidak terlahi menggantungkan pada birokrasi di atas, tetapi sebaliknya sekolah lebih bertumpu pada kekuatan masyarakat sekitar. Untuk itu, keberadaan pemimpin iokai disamping kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan kunci dari keberhasilan sekolah.

Pemimpin lokai, tokoh masyarakat dan kepala sekolah harus senantiasa memberdayakan [empowering] guru, antara lain dengan tidak banyak memberikan instruksi atau petunjuk melainkan memberikan tantangan, insentif dan penghargaan dan melaksanakan misi sekolah. Keberhasilan reformasi pendidikan ditentukan oleh keberhasilan dalam memberdayakan guru, yakni, guru memiliki otonomi profesional dan kekuasaan untuk menentukan bagaimana visi dan misi sekolah harus diwujudkan dalam praktek sehari-hari. Pemberdayaan guru ini akan memungkinkan mereka memadukan apa yang mereka yakini dengan agenda aksi reformasi.

c. Dimensi Teknik Operasional

Dimensi teknis berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan profesional dan bagai mana keduanya dapat dikuasai oleh pendidik. Dengan kata lain, aspek teknis dipusatkan pada kemampuan dan kemampuan guru untuk melakukan reformasi pada dimensi kelas atau melaksanakan proses belajar mengajar sebagai mana dituntut oleh reformasi. Sudah barang tentu hal ini menuntut adanya perubahan perilaku baik siswa, kepala sekolah dan juga di lingkungan kantor pendidikan selaku pihak yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Kemampuan guru yang dituntut dalam setiap reformasi pendidikan pada umumnya adalah kemampuan penguasaan materi kurikulum dan kemampuan pedagogik. Orientasi kurikulum harus lebih menitikberatkan pada penguasaan akan konsep-konsep pokok, dan lebih menekankan berbagai hubungan antar konsep konsep tersebut, serta lebih menekankan pada cara bagaimana peserta didik menguasai konsep dan hubungan untuk dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat dibandingkan hanya menguasai serpihan-serpihan pengetahuan dan kumpulan fakta. Di samping kurikulum harus disempurnakan, guru harus memahami dan memiliki motivasi untuk mempergunakan pendekatan dan cara mengajar yang sesuai dengan metode mengajar yang benar. Untuk itu perlu dikembangkan tim kerja yang melibatkan guru dan ahli. Misal lewat MGMP, seminar, pelatihan dan lewat media cetak dan elektronik, agar dapat meningkatkan komunikasi akademik baik di kalangan guru sendiri maupun dengan kalangan luar sekolah. Dengan komunikasi ini diharapkan secara berkesinambungan para guru akan mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya sendiri.

d. Dimensi Kontekstual

Pendidikan tidak berproses dalam suasana vakum dan tertutup, namun terbuka, senantiasa berinteraksi dengan aspek-aspek lain yang berada di luar pendidikan. Aspek-aspek lain tersebut dapat memiliki dampak positif maupun negatif bagi pendidikan. Aspek-aspek tersebut antara

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan lain: a) kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, b) perkembangan media massa, dan, c) sistem politik pemerintahan. Keberhasilan reformasi pendidikan juga ditentukan oleh seberapa besar dukungan masyarakat. Warga masyarakat, khususnya mereka orang tua siswa yang memiliki kelebihan dalam harta dan pendidikan perlu dilibatkan dalam proses reformasi sejak awal. Dukungan masyarakat pada umumnya, dan orang tua siswa khususnya tidak sebatas dukungan finansial, tetapi jauh lebih luas. Termasuk antara lain dukungan orang tua siswa dalam bentuk partisipasi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Untuk itu, orang tua siswa khususnya dan tokoh-tokoh masyarakat pada umumnya, perlu diajak memahami visi dan misi sekolah, dan mengambil peran dalam melaksanakan misi sekolah sesuai dengan keyakinan dan kemampuan mereka sendiri.

### 3. Perlunya Reformasi Pendidikan

Terinspirasi dari model reformasi pendidikan di Amerika Serikat yang diawali dengan kajian mendalam tentang kenyataan pencapaian pendidikan yang mereka selenggarakan, nampaknya pendidikan di Indonesia perlu mengadaptasi pengalaman baik (*the best practice*) yang dilakukan oleh negara-negara lain di dunia termasuk negara-negara di Amerika dan Eropa. Jika reformasi pendidikan di Amerika dipicu oleh adanya hasil temuan yang berkaitan dengan (1) konten seperti kurikulum; (2) ekspektasi negara tentang tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; (3) waktu yang dihabiskan oleh peserta didik di rumah dan di sekolah; dan (4) temuan yang berhubungan pembelajaran, dalam hal ini tentang profesionalisme guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, maka Indonesia perlu merumuskan berbagai hasil temuan sehingga permasalahan yang membelenggu sistem pendidikan selama ini betul-betul dapat teridentifikasi dengan baik secara menyeluruh.

Begitu pula, pengalaman baik sebagian besar negara-negara Eropa yang mengkaji secara bersama-sama kecenderungan perubahan global yang membawa dampak pada pelaksanaan restrukturisasi pendidikan pada masing-masing negara di Eropa. Restrukturisasi sistem pendidikan tinggi distimulasi oleh empat fenomena, yakni (1) transformasi aktivitas industri, (2) proses neoliberalisasi telah meningkatkan arus mobilitas tenaga kerja yang berkualitas, (3) bersatunya kekuatan ekonomi dan politik di Eropa meningkatkan arus kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang, (4) proses neoliberalisasi berdampak pada memudarnya *nation state*.<sup>15</sup>

Secara internal, berbagai kendala yang dihadapi oleh sektor pendidikan Indonesia menjadi alasan kuat tentang perlunya melakukan reformasi sistem pendidikan nasional. Adapun kendala-

---

<sup>15</sup> Yaumi, *Reformasi Sistem Pendidikan di Indonesia: Suatu Refleksi Kritis Menuju Perbaikan Kualitas*.

kendala yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Rendahnya mutu pendidikan dan tingginya angka putus sekolah
- b. Rendahnya kesadaran dan penguasaan teknologi para pelaku pendidikan sehingga belum dimanfaatkannya secara maksimal ilmu dan teknologi bagi kemajuan pendidikan
- c. Belum terciptanya budaya belajar di kalangan masyarakat
- d. Profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang masih belum sesuai dengan tantangan peningkatan mutu.
- e. Menurunnya status kesehatan dan gizi sebagian peserta didik sebagai dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar
- f. Terjadinya gejala umum menurunnya moral, budi pekerti, dan rasa toleransi di kalangan peserta didik dan generasi muda.<sup>16</sup>

## **KESIMPULAN**

Reformasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Sebab, cara-cara yang selama ini diiaksanakan dalam pengelolaan pendidikan tidak akan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang muncul saat ini. Krisis moneter dan ekonomi yang diikuti oleh krisis politik, kepercayaan dan keamanan, mempercepat realisasi reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan yang diperiukan bersifat menyeluruh dan mendasar, menyangkut dimensi kultural-fondasional, politik-kebijakan, teknis-operasional, dan, dimensi kontekstual. Tambal sulam dalam dunia pendidikan saat ini harus dihindarkan, sebab hanya akan berakibat menunda datangnya bencana yang lebih parah lagi. Betapapun Reformasi merupakan suatu keharusan, tetap saja akan muncul resistensi yang menghambat jalannya reformasi.

## **SARAN DAN REKOMENDASI**

Penyelesaian permasalahan pendidikan nasional tidak dapat dilakukan dengan hanya melakukan perubahan birokrasi sistem kelembagaan seperti pemisahan atau penyatuan kembali departemen dan kementerian pendidikan dan kebudayaan, tidak dapat juga dilakukan dengan penambahan jumlah menteri dan wakil menteri, atau dengan rancangan program seratus hari menteri pendidikan dan kebudayaan karena semua itu belum dapat mengungkap permasalahan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut ini dipandang dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis berkepanjangan yang membawa dampak pada rendahnya daya saing bangsa ini terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Adapun rekomendasi yang

---

<sup>16</sup> Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 61.

Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan dimaksud adalah:

Pertama, pembentukan komisi nasional untuk kemajuan pendidikan yang bertugas mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan pendidikan yang selama ini membelenggu bangsa ini sekaligus merumuskan solusi penyelesaiannya. Komisi ini bertugas melakukan riset tentang kelemahan dan kelebihan mulai dari aspek konten, tercapainya target dan harapan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sampai pada restrukturisasi sistem sekolah termasuk waktu yang digunakan untuk pelaksanaan proses belajar serta yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran.

Kedua, pemberian kewenangan dalam desentralisasi pendidikan perlu diperluas termasuk dalam mengembangkan kurikulum, manajemen berbasis sekolah, dan sistem perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan harus berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan tetapi tetap berada dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak berbasis pada satuan pendidikan, melainkan sudah dirancang hampir keseluruhan dari konten dan struktur kurikulum itu sendiri secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Satuan pendidikan hanya diberi kewenangan dalam membuat indikator yang sebenarnya sudah terjabarkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diberikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, kreativitas guru tidak berkembang dan cenderung mengabaikan tuntutan kompetensi dan keprofesionalitannya.

Ketiga, aspek pembiayaan sebagaimana diamanahkan dalam undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional harus segera direalisasikan. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Halevy, Eva Etzioni. *Demokrasi & Birokrasi: Sebuah Dilema Politik*. Yogyakarta: Metapena Institute, 2011.
- Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3.
- Jalal, Fasli, dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Jones, C. O. "American Politics And The Organization Of Energy Decision Making." *Annual Review of Energy* 4, no. 1 (1979).
- Junaid, Hamzah. "Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional)." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 7, no. 2 (2012).
- Kiwang, Amir Syarifudin, David B. W. Pandie, dan Frans Gana. "Kebijakan Publik dan

*Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 16, No. 3  
Mei - Juni 2022

- Muhidin Arifin, Fahrizal Akhiruddin : Permasalahan Dalam Reformasi Birokrasi Dalam Sektor Pendidikan Efektivitas Organisasi.” Jurnal Kebijakan Publik 5, no. 3 (4 September 2014).
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya, 2017.
- Yaumi, Muhammad (2017) Reformasi Sistem Pendidikan di Indonesia: Suatu Refleksi Kritis Menuju Perbaikan Kualitas. Discussion Paper. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
- Rahardjo, Didit Putra Erlangga. “Rapor Merah untuk Pendidikan di Kota Bandung.” KOMPAS.com (blog), 2012.  
<https://edukasi.kompas.com/read/2011/12/27/16432084/Rapor.Merah.untuk.Pe%20ndidikan.di.Kota.Bandung>.
- Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosoal Humaniora Pad Umumnya. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Thoha, Miftah. Birokrasi & Dinamika Kekuasaan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Zamroni. “Reformasi Pendidikan Dari Pondasi ke Aksi.” EL TARBAWI, 2016.
- Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.